

Kebijakan Ekonomi Luar Negeri China dari Masa ke Masa dan Ambisi Internasionalisasi BUMN China di Tangan Xi Jinping

Aspin Nur Arifin Rivai

Program Studi Hubungan Internasional UIN Alauddin

askaspin@gmail.com

Abstrak — *Contemporary China's economic growth has shown a prestigious, spectacular, and increasingly strategic position. This is due to the success of the Beijing's administration in launching reforms program and open-door policy of the foreign economy in 1978. Based on this research, China's global initiation actually started with the vision and legacy of Deng Xiaoping's leadership, namely the policy of good neighbor relations which was in turn transformed by Xi Jinping through an assertive and ambitious style. This can be seen from the emergence of Belt and Road Initiative (BRI). This research shows that there are three factors underlying Xi Jinping's choice to formulate BRI as the foreign economic policy agenda. First, BRI is a reform in aligning cooperation and economic integration. Second, the emergence of BRI here is Xi Jinping's rationalization to avoid the risk of excess production capacity after the 2008 global financial crisis, so that BRI is used as a medium for relocating the excess capacity. Third, the emergence of BRI as a foreign economy policy is actually a continuation of the SOEs reform itself. That is, China's SOEs internationalization program must get a special arena through the full intervention of Xi Jinping.*

Kata Kunci — Foreign Economy Policy, China's Dream, BRI, dan Chinese SOEs Internationalization.

I. PENDAHULUAN

Kekuatan Cina kontemporer secara kapabilitas material dari sisi ekonomi dan militer telah mendapat perhatian luar biasa dalam lingkungan politik internasional.

Setidaknya, kekuatan itu menjadi lonceng bahwa kebangkitan Cina dipandang berpotensi menggeser dominasi Amerika Serikat. Tepatnya, pasca krisis finansial global tahun 2008.

Terlepas debat di banyak kalangan ahli menyebut keberadaan Cina telah memengaruhi dinamika distribusi kekuatan yang pada gilirannya memunculkan pertanyaan besar. Di satu sisi, apakah negeri tirai bambu ini akan menggelar kekuatannya secara agresif sebagaimana wujud pihak revisionis dalam mengusik *status-quo*, yakni AS, ataukah di sisi lain berwujud asertif dengan cara memanfaatkan pertumbuhan kekuatannya sebagai alat tawar untuk memperluas jangkauan keuntungan ekonomi dan politiknya tanpa berambisi menjungkal hegemoni *status-quo* sebagaimana terlihat Cina masih bertindak kompromistik terhadap tatanan liberalisme yang dilegaskan oleh kekuasaan AS.

Sesungguhnya, debat di atas hampir pasti tidak akan pernah usai sepanjang kehadiran Cina semakin prestisius, sementara AS secara kapabilitas material kian merosot dalam konfigurasi internasional. Namun, perhatian yang kita perlukan saat ini adalah melihat konteks pertumbuhan ekspansif ekonomi yang pada gilirannya memengaruhi posisi politik strategis berdasarkan analisis kebijakan ekonomi luar negeri.

Pintu masuk keberhasilan Cina sesungguhnya bergantung kepada resep kebijakan domestik yang disebut program Reformasi yang kemudian mendorong

mengikutsertakan Cina dalam palagan globalisasi ekonomi. Wujud KELN inilah yang disebut sebagai '*Open Door Policy*'. Tingkat estafet pengglobalisasian Cina dilanjutkan oleh beberapa pemimpin cemerlang berikutnya. Namun, peran yang paling ambisius datang dari figur Xi Jinping.

Selama program reformasi ekonomi dan keterbukaan ekonomi luar negeri, aktor bisnis China tumbuh secara dinamis baik dalam individu, swasta, saham, dan saham gabungan. Pertumbuhan jumlah partisipasi perusahaan sektor investasi asing menjadi ciri distingtif penyelenggaraan ekonomi luar negeri China. Kepiawaian pemerintah mendorong unit bisnis mereka melaksanakan interaksi dan transaksi menjadi bagian tak terpisahkan bagaimana negara ini mampu menikmati kemajuan prestisius mereka.

Semenjak badai KFG 2008 berkecamuk, tidak berarti posisi Cina secara ekonomi melemah secara tajam. Justru sebaliknya di mana kian strategis secara ekonomi (Naughton, 2007). Langkah ambisius China pada tahun 2025 hendak menginvestasikan mencapai US\$ 1,25 triliun yang dipandang melebihi rekor investasi sebelumnya yang dibuat oleh AS atau Uni Soviet dalam persaingan geopolitik masa lalu menuju kekuasaan hegemonis (Tracy, Shvarts, Simonov, & Babenko, 2017).

Sosok kepemimpinan Xi Jinping memang paling menyita banyak perhatian. Betapa tidak, secara figuritas politik di tingkat domestik, ambisi atau visi ekonomi-politiknya dituangkan dalam Konstitusi PKC. Sebagaimana juga pernah dilakukan oleh pemimpin revolusioner Cina dahulu, yakni Mao Zedong, dan juga tokoh reformis, yakni Deng Xiaoping. Di antara tiga pemimpin besar ini, hanya Xi Jinping-lah yang menguasai jabatan-jabatan strategis domestik, mulai dari Sekjen Partai Komunis Cina, Ketua Komisi Militer Pusat PKC, Presiden Republik Rakyat Cina, dan Ketua Komisi Militer Sentral RRC. Menariknya lagi, secara kepemimpinan tertinggi negara, Xi Jinping hampir pasti mampu mempertahankan dan memperluas kekuasaannya tanpa ada batasan. Momen kepemimpinan diktator pasca Perang Dingin dianggap usang, tampaknya

masih menjadi romantika tersendiri di kalangan rezim komunis Cina. Para kader dan petinggi dewan PKC hampir pasti bersepakat bahwa komando kekuasaan Xi Jinping harus diberi legitimasi demi menyuksesi pencapaian Cina tahun 2050. Dua poin dari visinya, yakni memodernisasi Cina dan menempatkan Cina sebagai kekuatan sentris global. Oleh sebab itu, banyak kalangan meyakini bahwa kepemimpinan Xi Jinping mengarah pada suatu pola mendasar, yakni ia berambisi menampilkan pertunjukan transisi kekuasaan dunia di depan mata di tengah kemerosotan dominasi ekonomi AS (Allison, 2017; Mearsheimer, 2014; He, 2017; Scobell, 2021) Salah satu wujud konkrit yang dipentaskan oleh Xi adalah pengglobalisasian dunia melalui lanskap Cina yang termuat pada program kerja sama *Belt and Road Initiative* (BRI) yang dipandang sebagai siasat mendelegitimasi dominasi ekonomi AS (Blanchard & Flint, 2017; Blanchard, 2017; Rolland, 2017).

II. TINJAUAN PUSTAKA

Seperti dalam bisnis apa pun, *self-interest* mustahil tercapai tanpa persetujuan dari pihak mitra. Asumsinya adalah, jika BRI berhasil, maka pengaruh geopolitik China akan kian meningkat. Tetapi untuk memastikan berhasil, maka China harus terlebih dahulu mengamankan kerja sama dari mitra internasionalnya yang sesungguhnya menjadi tantangan kontemporer China (Ferdinand, 2016). Misalnya, kesediaan Polandia untuk mendukung BRI akan berdampak besar pada keberhasilan Silk Road Economic Belt. Sebab, kehadiran jalur kereta api akan menghubungkan antara Eropa dengan Rusia (Górski, 2016). Tantangan lain juga melibatkan ketegangan politik yang sudah berlangsung lama antar negara. Misalnya juga, India enggan berpartisipasi penuh dalam proyeksi BRI karena di balik jalur transportasi yang disediakan oleh Cina menghubungkan antara Pakistan-India. Padahal kedua negara tersebut memelihara ketegangan politik (Das, 2017; Garlick, 2017; Jacob, 2017). Patut juga mengingat bahwasanya Cina merupakan negara multi-etnis, sehingga gesekan konflik terbuka lebar. Jalur BRI

sesungguhnya melintasi koridor provinsi-provinsi Barat Cina. Strategi Cina dalam merespon ketegangan di sana akan menjadi ukuran dari keberhasilan BRI di masa depan (Mackerras, 2015). Literatur di sini memberi perhatian kepada aspek geostrategis dengan kesimpulan mendasar bahwa BRI berkecenderungan mengubah *status-quo*. Dengan demikian, BRI tidak semata-mata menyangkut ranah kerja sama, tetapi juga menciptakan ketegangan baru).

Pendekatan lain juga memberi fokus kepada aspek kerja sama ekonomi. Kehadiran BRI sesungguhnya bukan hanya menghubungkan dunia melalui jalur kerja sama melalui rute kereta api, minyak, jalur pipa gas, dst. Melainkan sebagai upaya China menempatkan dirinya sebagai sentris baru melalui jaringan kapitalisme (Nordin & Weissmann, 2018). Hal ini menciptakan situasi baru, yakni China yang memiliki potensi FDI yang besar akan dengan mudah mereka salurkan ke koridor-koridor ekonomi yang tersedia, sekaligus berupaya menghilangkan berbagai hambatan-hambatan perdagangan. Demikian juga dalam pandangan Holslag (2017) bahwa China menghadirkan BRI ke Eropa sebagai peluang pendalaman interdependensi karena, menampilkan keterbukaan dan perdagangan bebas. Akan tetapi itu hanya sekedar wacana. Fakta dalam dokumen dan rencana aksi mengungkapkan bahwa BRI sejatinya melayani strategi merkantilisme ofensif China. Posisi tulisan-tulisan di sini memberi penekanan bahwa agenda BRI sarat pada ambisi hegemoni China.

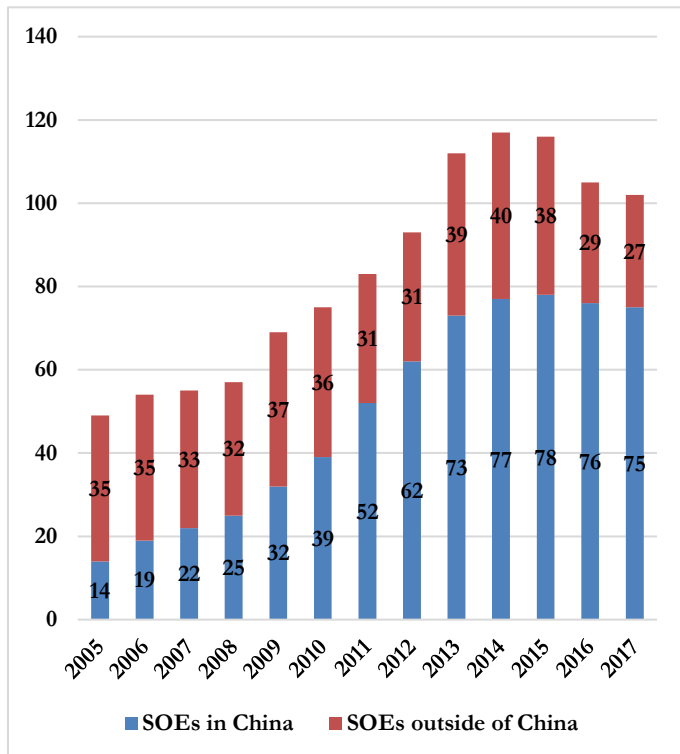
Penulis menilai diskusi seputar kemunculan agenda BRI sebagai wujud aktivisme ekonomi luar negeri belum menjadi perhatian arus-utama. Kajian kepada aspek ekonomi masih terpusat pada aspek industrialisasi, tenaga kerja, dan pembangunan ekonomi. Sebagaimana penelitian yang memberi perhatian pada aspek finansial dan moneter, misalnya Fung (2018), bahwa BRI sebagai instrumen internasionalisasi mata uang China. Pun dipahami oleh Chaisse & Matsushita (2018), bahwa kehadiran BRI ditujukan untuk penyeimbangan kembali atas cadangan mata uang asing. Dalam aspek ekonomi

makro diamati oleh Chen (2018) bahwa BRI sesungguhnya sebagai siasat untuk mengurangi kelebihan kapasitas produksi. Sementara dalam sisi pembangunan, kehadiran BRI sejatinya untuk memperkecil kesenjangan ekonomi yang dihadapi oleh beberapa provinsi-provinsi China, sekaligus mendapatkan kendali atas kelebihan populasi melalui pengurangan tekanan urbanisasi di kota-kota terluar (Chaisse & Matsushita, 2018; Williams, Robinson, & Bouzarovski, 2019).

Di luar dari diskusi itu masih memperlihatkan kekosongan tentang menjelaskan BRI sebagai instrumen KELN, khususnya dalam rangka menginternasionalisasi BUMN. Jika berkaca dari fakta lapangan, kehadiran BUMN Cina memiliki peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi pasca reformasi ekonomi dan keterbukaan ekonomi luar negeri.

Menurut data Fortune Global 500, semula BUMN China tercatat hanya berjumlah 27, dan jumlah ini meningkat menjadi 102 pada tahun 2017. Pada tahun itu pendapatan BUMN China mencapai US\$ 27,7 triliun. Selain 75 BUMN raksasa yang dicatat Fortune Global 500, terdapat lebih dari 150.000 BUMN berasal dari China. Kiprah keberhasilan ini sekali lagi membuktikan faktor reformasi ekonomi China menjadi variabel independen. Sektor BUMN China telah tumbuh secara signifikan dalam jumlah dan kapitalisasi pasar semenjak China meluncurkan reformasi ekonomi. Dengan senantiasa memandang kapabilitasnya lebih tinggi daripada Rusia. demikian, faktor reformasi menjadi variabel vital dari keberhasilan prestesius China hari ini. Berdasar dari data Komisi Supervisi Aset dan Administrasi (*State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council/SASAC*), aset BUMN China telah mencapai US\$ 22.310 miliar, dan telah menjual barang dan jasa mencapai US\$ 7.676 miliar tahun 2017.

Grafik 1. DOMINASI BUMN CHINA



Sumber: Fortune Global 500

Di sisi lain, perbincangan BRI memiliki neksus ekonomi-politik strategis, tetapi mengabaikan bagaimana pembentukan BRI sesungguhnya memiliki akar sejarah kepemimpinan atau legasi yang ditinggalkan oleh pemimpin pendahulu China. Oleh sebab itu, tulisan ini mencoba mengisi kekosongan perbincangan tersebut bahwa pembentukan BRI berdasar spirit bersama pasca kebijakan reformasi ekonomi dan keterbukaan ekonomi luar negeri tahun 1978. Apa yang menarik di sini ialah, tampak relasi antara kebijakan tersebut menuju ‘Impian China’.

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan dasar, mengapa KELN di masa kepemimpinan Xi Jinping memiliki perbedaan fundamental dibandingkan tokoh reformis sebelumnya?

Tulisan ini mengkonfirmasi bahwa di balik kepemimpinan Deng Xiaoping dalam mendeklarasikan reformasi ekonomi dan keterbukaan ekonomi luar negeri memberikan dampak transformatif bagi kekuatan ekonomi China. Dengan kata lain, pemimpin setelahnya

mengadopsi dan menerjemahkan lebih luas agenda-agenda internasional Cina dalam memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus memeluk ekonomi dunia. Dengan demikian, kebijakan regionalisme dan multilateralisme menjadi pilihan paling menonjol Cina pasca kepemimpinan Deng Xiaoping. Xi Jinping mendeklarasikan wujud kerja sama BRI tidak bisa sepenuhnya dijustifikasi sebagai wujud agresivitas atau pilihan revisionis dalam mendekonsentrasi kekuatan hegemonis. Kehadiran BRI harus dilihat sebagai agenda liberal China untuk terhubung pada pendalaman kemitraan strategis, yang memiliki implikasi mendasar. Artinya, kemunculan BRI merupakan strategi menggobal China melalui mekanisme KELN yang pada gilirannya digunakan menggapai sasaran strategis, yakni internasionalisasi BUMN. Posisi BUMN China telah menunjukkan status dasar, yakni mereka telah memainkan peran pro-pertumbuhan, karena 1) mampu menstabilkan pertumbuhan dalam kelesuan ekonomi dengan berinvestasi secara masif; 2) mempromosikan kemajuan teknis dengan berinvestasi di sektor teknologi tinggi; dan 3) keuntungan mereka yang kian membesar maka dengan mudah memenuhi pembayaran upah layak tinggi. Hal ini tentu menguntungkan pihak pemerintah China dalam rangka merawat dan meneruskan pertumbuhan di masa yang akan datang. Di balik peran ekonomi sentris semacam itu akan menjadi alat tawar mereka dalam domain politik. Dengan demikian, warna pengambilan keputusan ekonomi luar negeri China tidak bisa sepenuhnya didikte oleh rezim PKC semata. Apabila internasionalisasi BUMN mendapat ruang strategis selama keberlangsungan BRI, penulis menilai peran aktor bisnis kian diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Setidaknya mewarnai pembentukan orientasi dan sasaran ekonomi strategis ke depan.

III. HASIL DAN ANALISIS

A. Kepemimpinan China Dari Deng Xioping hingga Hu Jintao

Deng Xiaoping merupakan sosok terpenting di balik mentransformasikan kebijakan luar negeri China. Di awal

kepemimpinannya memiliki beberapa kesulitan utama saat menahkodai China. Peninggalan Revolusi Kebudayaan yang digagas oleh Mao Zedong tampaknya menyisahkan kekacauan ekonomi domestik dengan pendapatan per kapita selama setahun kurang dari US\$ 100 (Vogel, 2011). Hal ini menjadi tantangan utama bagi Deng Xiaoping dalam menjalankan agenda pembangunan domestik untuk keluar dari jerat kemiskinan dan ketertinggalan ekonomi.

Salah satu terobosan kebijakannya ialah kemunculan agenda reformasi ekonomi dan kebijakan pintu terbuka (keterbukaan ekonomi luar negeri) yang telah dijelaskan sebelumnya. Perlu diketahui, kebijakan ini bukan sepenuhnya dari hasil gagasan yang dituangkan oleh Deng Xiaoping, namun bermula dari Hua Guofeng yang merupakan penerus pemimpin tertinggi PKC setelah kepemimpinan Mao Zedong tahun 1976 (Sung, 1991). Deng mengambil gagasan kebijakan tersebut untuk meyakinkan kader PKC bahwa Revolusi Kebudayaan telah memberikan bencana yang amat mendalam bagi pembangunan negara (Russo, 2013). Atas dasar itu, Deng lantas menawarkan percepatan reformasi ekonomi dengan corak keterbukaan pasar.

Kebijakan pintu terbuka yang mengandung visi reformasi ekonomi menjadi bagian terpenting dalam menjelaskan proses transformasi kebijakan luar negeri China melalui nafas ekonomi. Dalam menerobos ketertinggalannya dalam konfigurasi internasional, para pemimpin reformis China bersepakat untuk melakukan perbaikan pola kebijakan dengan hirau pada agenda modernisme. Keputusannya terlihat semenjak Deng Xiaoping melakukan pembukaan hubungan kerja sama dengan kawasan Eropa yang ditandai dengan lawatan ke Perancis tahun 1975. Kemudian tahun 1978 melakukan normalisasi hubungan China dengan Jepang yang diiringi dengan bentuk diplomasi ekonomi dan kebudayaan. Selain itu, Deng Xiaoping lantas membentuk terobosan terpenting dengan upaya normalisasi hubungan China dengan AS pada awal 1979. Proses ini pertama-tama diisi dengan pertemuan kenegaraan hingga pertemuan para pemimpin-pemimpin bisnis mereka satu sama lain.

Corak KELN di bawah kendali Deng Xiaoping menunjukkan perbedaan besar dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya. Revolusi kebudayaan atau komunisme yang digagas oleh Mao Zedong memang menghasilkan kontribusi penting dalam menghasilkan “redefinisi” kekuatan domestik dan pengaturan model politik global alternatif. China menjadi negara kontra-hegemonik terhadap aliansi Barat sekaligus membangun kerangka kerja sama dengan berbagai negara poskolonial. Namun, kebijakan isolir yang dilakukan oleh Mao justru menghasilkan persoalan struktural dalam tingkat domestik. Pergeseran kepemimpinan Mao Zedong ke Deng Xiaoping menampilkan perubahan penting, khususnya dalam mendefinisikan arah kebijakan luar negeri China.

Proses reformasi ekonomi diimplementasikan melalui penyelenggaraan ekonomi global dengan memprioritaskan ekonomi yang berada di atas politik dengan mempraktikkannya pada tingkat regional lebih dahulu (Kavalski, 2009). Agenda ekonomi luar negeri juga harus selaras dengan visi perdamaian, sebab keduanya merupakan variabel yang terkait. Maka dari itu, KELN yang dilakukan oleh Deng dengan menempatkan ekonomi untuk perdamaian dan pembangunan, begitupun sebaliknya. Hal ini menjadi pijakan China untuk muncul sebagai negara berkembang yang mendahului perdamaian demi mengejar pembangunan ekonomi tanpa adanya belenggu dari tekanan eksternal (Yahuda, 1993).

Barulah pada Kongres PKC ke-11 tahun 1977, Deng memuculkan keputusan besar bahwa China harus membangun kerja sama dengan berbagai negara, baik negara sekitar maupun negara besar. Selain itu, China harus beradaptasi dengan fitur-fitur ekonomi internasional yang mengindahkan pada pengurangan intervensi negara dalam lingkungan pasar dan mengambil manfaat dalam skenario ekonomi politik internasional dengan menutup kesempatan konflik militer (*high-politics*). Doktrin ini turut memfasilitasi kebijakan luar negeri yang berfokus pada *good-neighbor relations* demi menghindari berbagai perpecahan atau konflik yang berlangsung di negara-negara sekitar sekaligus

membangun citra positif di tengah Perang Dingin yang memosisikan China sebagai aliansi dari Uni Soviet. Tujuan di balik doktrin ini ialah: (1) stabilitas politik domestik; (2) keamanan negara berupa kedaulatan, integritas kewilayahan, dan persatuan nasional; dan (3) Pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan (Jakobson & Knox, 2010).

Lantas, mengapa doktrin ini dapat memengaruhi KELN China?

Pada dasarnya, doktrin ini bersifat konvergen yang sesuai dengan reformasi ekonomi dan kebijakan pintu terbuka yang ditetapkan semenjak 1979. China berharap dengan kerja sama ekonomi yang terbuka dengan unit eksternal akan memberi pengaruh signifikan terkait orientasi pembangunan dan reformasi ekonomi domestik. Sebagaimana dalam pandangan Timothy R. Heath (2012) mengklaim bahwa dibalik doktrin ini tidak sekedar menampung prinsip Koeksistensi Damai, melainkan terdapat penekanan bahwa lingkungan internasional yang stabil sangat dibutuhkan oleh China.

Tonggak estafet reformasi ekonomi dan keterbukaan luar negeri kemudian diteruskan kembali oleh Jiang Zemin (1989-2002). Ia menghendaki desain KELN dalam merespon kerja sama multipolar. Pemerintah China memaknai bahwa berakhirnya Perang Dingin merupakan gerbang menuju tatanan internasional baru. Imajinasi pemerintah China yang melihat ketiadaan dominasi struktur internasional akan menghasilkan sebuah tatanan dimana unit hubungan internasional bersifat setara (Men, 2008). Akibatnya, memberi kesempatan yang luas bagi terciptanya perdamaian dan pembangunan global yang sesuai dengan visi kebijakan luar negeri China.

Meskipun bersifat utopis, pemerintah China menilai tatanan yang mengarah multilateral merupakan sebuah kesempatan yang terbuka lebar apabila persoalan global diselesaikan oleh keterlibatan negara-negara secara kolektif. Di samping itu, mereka menyadari bahwa untuk membendung kembalinya gesekan kepentingan antar negara, maka keperluan kerja sama harus didahulukan

melalui agenda ekonomi yang merupakan sifat dari *low-politics*.

Fokus KELN China di masa Jiang sesungguhnya berada pada wilayah interdependensi komersial dalam ruang global dan regional. Tujuannya adalah meningkatkan stabilitas dan kemakmuran bersama. Dengan kebutuhan ekonomi global yang tinggi, pemerintah China memerlukan strategi dan KELN yang mampu beradaptasi dengan skenario dari perubahan global yang cepat. Dalam menyampaikan maksud tersebut, Jiang Zemin menekankan gagasan ini pada Kongres PKC ke-16 tahun 2002. Dalam pidatonya mengafirmasi bahwa kebutuhan ekonomi China bergantung pada keamanan internasional, sehingga China harus menjadi negara aktif dalam mensponsori misi perdamaian regional dan global (en.people.cn, 2002). Praktik ekonomi luar negeri China di bawah kendali Jiang Zemin telah meneruskan imajinasi Deng Xiaoping mengenai lingkungan internasional dalam kondisi multipolar, sekaligus membawa China tetap merawat pertumbuhan ekonominya melalui doktrin pembangunan dan perdamaian (Layne, 1993).

Salah satu dedikasi terpenting Jiang Zemin dalam KELN adalah kehirauan pada kerja sama berbasis regionalisme ekonomi. Sikap ini ditandai dengan pernyataan Jiang Zemin pada pada Kongres PKC tahun 1997. Jiang menekankan bahwa China perlu secara aktif berpartisipasi dalam kerangka diplomasi multilateral dan regional, serta menjadikan China sebagai aktor yang berperan penuh terhadap institusi internasional yang telah tersedia. Selama periode 1990-an hingga 2000-an, China telah tampil sebagai negara yang terlibat dan mempromosikan kerja sama regional secara aktif melalui piranti ekonomi. Hal ini ditandai dengan negosiasi kerja sama perdagangan bebas. Deng Xiaoping yang semula membawa China terlibat dalam regionalisme ekonomi pada 1991 melalui *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), kemudian diperluas oleh Jiang Zemin yang ditandai dengan prioritas kerja sama di tingkat Asia Timur melalui kerangka regionalisme ekonomi.

Dua kepemimpinan di atas lantas diteruskan oleh

Presiden Hu Jintao (2002-2012) di mana prestasi cemerlangnya ialah memposisikan China masuk sebagai salah satu terpenting dalam struktur internasional dalam dekade milenium. Semenjak mengambil kemudi PKC pada tahun 2002, Hu Jintao tampil sebagai figur yang memiliki cara tersendiri menjadikan China sebagai aktor penting dalam konfigurasi internasional. Pertama-tama, Hu Jintao melakukan proses transisi dari pola kebijakan dalam dan luar negeri China yang lebih nasionalis, namun kompatibel dengan prinsip Konfusianisme yang merupakan akar budaya China (Callahan, 2005). Doktrin ini kemudian dikemas dengan istilah "harmonisasi" (Cao, 2007). Doktrin ini tidak sekedar untuk mempertahankan nilai luhur kebudayaan mereka, tetapi juga menjadi usaha untuk mengatasi persoalan ekonomi domestik.

Pertumbuhan ekonomi China yang fantastis semenjak reformasi ekonomi dan kebijakan pintu terbuka, di satu sisi mendapat status penting dalam konfigurasi internasional, namun di sisi lain keberhasilan ekonomi tersebut justru melahirkan sejumlah eksternalitas ekonomi negatif (Lin, 2004). Salah satunya ialah aset tetap yang ekseseif sehingga menciptakan kelangkaan relatif (*relative dearth*) dari konsumsi pemerintah dan privat. Fenomena ekonomi ini kemudian menjadikan China sebagai konsumen sumber daya global yang signifikan, menghasilkan kompetisi domestik yang ketat dan menurunkan harga beserta keuntungan, mengganggu pasar lapangan kerja, dan meningkatkan *fragilitas* sistem perbankan domestik. Di samping itu, China juga menjadi negara yang sangat bergantung pada ekspor luar negeri dibandingkan konsumsi domestik. Akibatnya, menghasilkan neraca pembayaran surplus, memicu likuiditas secara besar-besaran dan secara bersamaan menciptakan tekanan inflasi yang kuat dalam barang dan aset yang menghambat perkembangan sektor jasa China.

Menyadari atas persoalan ekonomi tersebut, Hu Jintao lantas menempuh strategi pembangunan ekonomi tahun 2005 yang secara bersamaan menuangkannya dalam rencana kebijakan domestik. Tujuannya yaitu mengatasi persoalan domestik sekaligus menciptakan peraturan

masyarakat harmonis (*harmonious society*) dalam berbagai dimensi kehidupan bernegara. Hu Jintao menilai bahwa doktrin ini tidak terkonsentrasi pada wilayah domestik semata, melainkan harus diimplementasikan melalui kebijakan luar negeri China.

China juga menghadapi tantangan signifikan dalam konteks eksternalitas. Lingkungan kawasan seperti di Asia Timur dan Asia Selatan memposisikan kebangkitan ekonomi dan politik China sebagai ancaman baru. Atas dasar itu, Hu Jintao memfokuskan kebijakan luar negeri yang hirau pada agenda pencitraan China sebagai negara yang mengalami kebangkitan ekonomi politik yang damai (*peaceful rise*).

Dalam Kongres PKC ke-17 tahun 2007, Hu Jintao kemudian menegaskan bahwa doktrin "harmoni dan perdamaian" akan menjadi istilah utama dari kebijakan luar negeri China. Hal ini digagas dengan berbagai pertimbangan utama, yaitu: (1) China harus memiliki nilai dan karakteristik dalam menyelenggarakan agenda luar negeri yang sesuai dengan pemahaman sosialisme kenegaraan dan akar kebudayaan; (2) perluasan reformasi dan akses ke seluruh bentuk kerja sama internasional (bilateral, regional, dan multilateral); dan (3) perdamaian digapai melalui visi harmoni dalam tertib nasional dan internasional (chinadaily.com.cn, 2007). Strategi ini tidak sekedar sebagai skenario internasional China dalam menghadapi perubahan besar yang dapat terjadi di tengah kompetisi global yang semakin ketat, melainkan juga sebagai cara untuk beradaptasi dan mengambil keuntungan dari skenario tersebut. Langkah ini telah mengisyaratkan atas kesiapan China menjadi negara yang lebih "asertif" dalam arena ekonomi politik internasional (Lam, 2009).

Doktrin harmoni dan perdamaian kemudian tersalurkan melalui KELN China. Menurut Jean-Marc F. Blanchard (2008) bahwa kehadiran doktrin ini dapat meneruskan pendalaman integrasi ekonomi China ke dalam sistem ekonomi global, kemudahan akses terhadap tatanan ekonomi internasional, dan dukungan untuk peningkatan kerja sama yang simbiotik. Lebih lanjut,

doktrin ini menjadi usaha China untuk menjadi aktor yang tidak sekedar terlibat dalam ruang kerja sama semata, melainkan mendukung perkembangan lingkungan internasional, kemandirian dalam menata dan mendesain kerja sama, dan memperjuangkan kerja sama berbasis multilateralisme.

Dalam wilayah yang lebih khusus, doktrin ini berpotensi memengaruhi institusi ekonomi internasional, investor eksternal, dan transaksi untuk kebutuhan sumber daya internasional China. Sementara itu, banyak ahli meragukan keberhasilan kepemimpinan Hu Jintao dalam arena internasional yang disebabkan dengan doktrin *low-profile*. Yang terjadi justru, kepemimpinannya mengarahkan China jauh lebih asertif semenjak keberhasilan ekonomi yang dialaminya pasca Perang Dingin (Mearsheimer, 2014; Jisi, 2011). Kepemimpinan Hu Jintao telah memberi pengaruh signifikan bagi pertumbuhan ekonomi China. Konsentrasi diplomasi ekonomi China telah dipandang sebagai bagian terpenting dari keberhasilan ekonominya. Sebagaimana dicatat oleh Evan Medeiros (2009) bahwa diplomasi ekonomi telah menjadi tema sentral di bawah kepemimpinan Hu Jintao. Bahkan, kebaruan diplomasi ekonomi China telah ditonjolkan melalui perdagangan, investasi, dan kebijakan finansial untuk menggapai tujuan diplomatik China. Berbeda dengan pemimpin sebelumnya yang memposisikan diplomasi dan ekonomi sebagai arena yang terpisah.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan kepemimpinan China semenjak keterpilihan Xi Jinping?

Dari sekian pengamatan yang ada, sebagian ahli meyakini bahwa corak kebijakan luar negeri China di bawah kendali Xi Jinping mulai menggeser kebijakan *low-profile* menjadi *striving for achievement*. Transisi semacam ini menunjukkan suatu kondisi bahwa China tidak hanya berfokus untuk menjaga atau meningkatkan ekspansi ekonominya, melainkan juga berorientasi menjadi sentris di tingkat kawasan dan internasional. Fenomena ini kemudian semakin relevan untuk dijelaskan melalui model KELN Xi Jinping di pembahasan berikutnya.

B. Menerjemahkan “Impian China”: Telaah Kepemimpinan Xi Jinping

Dari penjelasan yang telah ditampilkan sebelumnya, penulis menilai corak diplomasi China telah bergeser dari status terisolasi, pasif, reaktif, dan kekuatan regional tradisional menuju yang lebih pro-aktif, interaktif, dan interkoneksi. Perubahan dan kebangkitan China sebagai *quasi super-power* telah memperlihatkan wujud paling penting dalam arsitektur internasional di abad ke-21 (Lam, 2015; Yongnian & Chi, 2018). China telah dipandang sebagai pesaing strategis AS sekaligus penantang potensial untuk supremasi global AS, khususnya di Asia Pasifik. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa sikap membumi menjadi ciri khas kebijakan luar negeri China Deng Xiaoping mulai mengalami perubahan atau pengikisan secara bertahap di tengah pertumbuhan dan ekspansi ekonomi China dalam beberapa tahun belakang.

Gejala pergeseran bermula semenjak Hu Jintao menekankan bahwa China akan menjadi negara yang asertif untuk merespon Krisis Finansial Global 2008. Persisnya, saat Hu Jintao berpidato pada rapat kenegaraan bulan Juli 2009. Hu menekankan bahwa China harus menjadi aktor dengan kekuatan dan pengaruh yang lebih luas dalam arena internasional (Johnston, 2013). Pandangan ini termanifestasi melalui prinsip kebijakan membumi, namun proaktif dalam mengejar impiannya (*striving for achievement*) (Xuetong, 2014). Jika dibandingkan dengan prinsip membumi ala Deng Xiaoping, eksistensi China tidak akan menjadi negara agresif atau penantang *status quo* kekuatan internasional. Hal ini menjadi enigma, apakah prinsip membumi melalui pandangan Hu sebagai suatu narasi yang menyembunyikan keinginan China untuk menjadi negara pengusik kekuatan hegemonis ataukah istilah asertif dimaknai sebagai wujud perimbangan ekonomi semata?

Dalam suatu pernyataan Hu Jintao dihadapan kader PKC, ia menekankan bahwa China harus mengejar “Empat Kekuatan” dalam episentrum global, yaitu: (1) China harus mencapai pengaruh yang lebih besar dalam struktur politik internasional; (2) memperkuat daya saing ekonomi

global; (3) mengembangkan afinitas terhadap citranya dalam status internasional, dan; (4) menjadi kekuatan baru yang lebih menarik di hadapan unit hubungan internasional (Masuda, 2016).

Semenjak Jintao berakhir, gerbang perdebatan berikutnya adalah menjawab pertanyaan esensial, yaitu apakah suksesi Presiden China selanjutnya akan meneruskan sikap membumi yang telah ditinggalkan oleh beberapa pemimpin sebelumnya ataukah justru sebaliknya?

Pada bulan November 2012, Xi Jinping secara resmi terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Komite Partai Komunis China dalam sidang pleno pertama Komite Sentral ke-18. Di hari-hari awal kepemimpinannya, Xi Jinping menghadiri sebuah ekshibisi yang diselenggarakan oleh Museum Nasional China dengan tema *"The Road Toward Renewal"*. Dalam sambutannya, Xi Jinping menyerukan visi negara China dengan penekanan bahwa bangsa China harus menggapai segala bentuk pembaruan yang sekaligus mewujudkan Impian China sebagai bangsa yang jaya dalam sejarah modern saat ini (china.org.cn, 2012). Titik penekanan dari deklarasi tersebut ialah "Impian China (*China Dream/Zhongguo Meng*)". Slogan ini kemudian secara resmi disampaikan dalam pidato pengukuhan sebagai Presiden China pada Kongres Rakyat Nasional ke-12 pada bulan Maret 2013 (chinadaily.com.cn, 2013).

Kader-kader PKC mulai berantusias dengan slogan politik Xi Jinping yang berani untuk membangunkan kembali kejayaan masa lalu China, tepatnya di era kedinastian. Impian China telah memunculkan perbedaan mendasar dibandingkan dengan diktum Deng Xiaoping, yaitu *"hide [its] capabilities and lie low"* (Poh & Li, 2017). Hal ini melahirkan sebuah pertanyaan mendasar yaitu bagaimana dengan karakteristik dari Impian China?

Impian China mengacu pada dua tujuan spesifik. Pertama, masyarakat China mendapatkan kesejahteraan dalam segala hal. Pemerintah China menargetkan visi ini terimplementasi pada tahun 2021 – yang berarti sebagai perayaan PKC yang genap berusia 100 tahun. Kedua,

menjadi negara sosialis modern yang diiringi dengan kemakmuran, kekuatan, peradaban yang berkemajuan, dan harmonis. Target ini juga harus dicapai untuk menghadiahi perayaan kebangsaan Republik Rakyat China yang ke-100 pada tahun 2049.

Terdapat beberapa cara dalam menggapai impian tersebut, salah satunya ialah penataan diplomasi luar negeri China. Dalam merespon visi Impian China, para jajaran birokrasi China membentuk forum yang bersifat khusus untuk membahas orientasi dan agenda diplomasi China. Selang setahun kemudian pasca penyampaian doktrin Impian China, Xi dalam *Central Conference on Work Relating to Foreign Affairs* yang merupakan forum yang diselenggarakan oleh Politburo [Biro Politik PKC] untuk menyempurnakan strategi diplomasi China. Di hadapan forum, Xi menekankan relevansi pembentukan diplomasi strategis China ke negara-negara sekitar demi menjaga laju kebangkitannya. Dalam isi pidatonya, Xi Jinping menyampaikan orientasi diplomasi strategis tersebut dengan sebutan "komunitas dengan tujuan bersama (*community of common destiny*)" (China's MOFA, 2014). "Promosi di tingkat domestik mendapat dukungan penuh dari pihak kader-kader PKC. Lantas, diteruskan di tingkat internasional, di mana Xi berpidato dalam Sidang Umum PBB ke-70. Xi secara terbuka mempromosikan agenda diplomasinya yang menekankan lima perspektif kemitraan berupa politik, keamanan, pembangunan ekonomi, pertukaran kebudayaan, dan lingkungan (Zhang, 2017)".

Dua pernyataan di atas menunjukkan bahwa pemerintah China sedang menempuh pendekatan diplomatik yang lebih khusus sesuai dengan statusnya sebagai kekuatan ekonomi dan keamanan yang diperhitungkan dalam struktur internasional. Pernyataan Xi Jinping kemudian diteruskan oleh Perdana Menteri China Wang Yi dalam Simposium Pembangunan dan Diplomasi China pada bulan Desember 2014. Wang Yi menekankan bahwa karakteristik diplomasi China sesuai dengan statusnya sebagai kekuatan besar dalam konfigurasi internasional. Dalam mengimplementasikan karakteristik diplomasi tersebut, Wang Yi menyebutkan ke

dalam empat tindakan, yaitu (1) membangun jenis hubungan kerja sama yang lebih baru dengan pola yang saling menguntungkan satu sama lain; (2) membangun jaringan kemitraan global; (3) mengejar Impian Asia Pasifik; dan (4) mengejar visi Keamanan Asia (Poh & Li, 2017).

Keempat karakteristik tersebut sejatinya menunjukkan bahwa ambisi Impian China tidak sekedar terkooptasi oleh negara China sendiri, namun tersebar dan terbuka bagi kawasan Asia sendiri.

Secara keseluruhan, pernyataan-pertanyaan resmi di atas telah menggambarkan determinasi kekuatan China untuk memperluas pengaruhnya, baik di dalam maupun di luar kawasan Asia Pasifik. Dapat dikatakan juga bahwa hubungan eksplisit antara inisiatif diplomasi China dan visi Xi Jinping – Impian China telah menjadi aspek baru dalam kebijakan luar negerinya. Atas dasar itu, sikap membumi yang menjadi legasi dari Deng Xiaoping semakin tidak relevan bagi orientasi dan agenda kebijakan luar negeri China. Xi Jinping justru menekankan bentuk asertif, namun dibingkai dengan pernyataan retoris bahwa China akan konsisten mengejar impiannya sebagai negara besar yang diperhitungkan dalam arena regional dan global (Jerden, 2014).

Jika disederhanakan, perbedaan antara sikap membumi dengan sikap mengejar impian, yaitu: (1) tujuan dan strategi sikap membumi adalah menjaga perdamaian di wilayah atau kawasan secara berkesinambungan guna mengakselerasi pembangunan ekonomi China; dan (2) sikap mengejar impian hampir menunjukkan kesamaan dari sikap sebelumnya yaitu menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas regional, namun saat bersamaan juga kebijakan luar negeri China tidak sekedar melayani kebutuhan pembangunan ekonomi, melainkan juga “Rejuvinasi Nasional (*national rejuvenation*)”.

Rejuvinasi Nasional adalah istilah lain dari Impian China yang merujuk kepada target-target nasional untuk tahun 2021 dan 2049. Sementara itu, Impian China dapat dipahami sebagai prinsip baru yang membimbing arah

pembangunan domestik, serta bagaimana China seharusnya memengaruhi struktur ekonomi politik internasional. Penulis memandang bahwa sikap mengejar impian sejatinya mencerminkan pendekatan KELN yang khas ‘bina ekonomi negara (*economic statecraft*)’. Terma “Impian” menunjukkan hasrat China untuk menggunakan “kekayaan” yang belum digunakan secara maksimal demi penggapaian tujuan ekonomi politik strategis. Istilah kebijakan itu adalah *striving for leadership*. Jelasnya, kekayaan ekonomi harus menjadi motor penggerak kekuasaan China dalam arena internasional.

Relevansi Impian China terhadap praktik KELN dapat dijelaskan melalui perpaduan pendekatan diplomatik secara holistik antara insentif (*carrot*) dan ganjaran (*stick*) di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Pertama, para jajaran pemerintahan China mengedepankan kebijakan luar negeri yang lebih lunak yang berbeda dengan model diplomasi Barat yang hirau pada nilai-nilai demokrasi liberal. Selanjutnya, narasi ini menjadi elemen kebijakan luar negeri China dengan penegasan bahwa orientasi “pembangunan yang damai (*peaceful development*)” bukan sekedar jualan atau retorika diplomatik semata, melainkan sebagai preskripsi KELN dalam melukiskan kejayaan China di masa yang akan datang. Atas dasar itulah, kepemimpinan Xi Jinping mendeklarasikan pola hubungan internasional China dengan fokus membangun jaringan kemitraan tanpa membentuk atau terlibat dalam aliansi. Akibatnya, pemerintah China lebih menggunakan pendekatan yang jauh lebih pragmatis dengan mengabaikan disparitas politik dan ideologis di antara negara-negara lainnya. Tujuannya adalah memaksimalkan manfaat ekonomi bersama. Di sinilah letak perbedaan antara kebijakan luar negeri lunak antara China dengan negara-negara Barat lainnya. Kedua, Xi Jinping cenderung menekankan pendekatan asertif. Pendekatan ini merujuk pada penggunaan kekuatan militer sebagai salah satu elemen utama dari kebijakan luar negeri China. Pengadopsian kekuatan militer diharapkan untuk menjaga jantung kepentingan (*core interest*) ekonomi politik China di tengah kompleksitas regional dan global (Garnaut,

2013).

Pemerintah Cina berusaha menggapai target tersebut, karena dapat meningkatkan kredibilitas strategis China, sekaligus memengaruhi lingkungan ekonomi-politik regional dan internasional. Dengan demikian, praktik bina ekonomi negara bertujuan untuk menginkorporasi antara kepentingan China dengan negara-negara sekitar secara selaras. Negara-negara yang mendukung dan memainkan peran konstruktif dalam pembangunan China akan menerima keuntungan atau manfaat ekonomi dan keamanan. Sebaliknya, negara-negara yang menentang atau berusaha mencegah pembangunan China akan diabaikan atau dilanggar.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana slogan politik Xi Jinping melalui *striving for achievement* diimplementasikan ke dalam KELN China?

Dalam menguraikan jawaban ini, tulisan ini menunjukkan bahwa terdapat empat perhatian Xi Jinping dalam mengemudikan KELN China, sekaligus meneruskan legasi yang telah ditorehkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya.

Pertama, promosi internasionalisasi mata uang China (*Renminbi/RMB*). Kedua, perluasan strategi perdagangan bebas. Ketiga, peningkatan investasi untuk melindungi sumber daya, pasar, dan teknologi. Dalam konteks di sini, peran aktor bisnis China dianggap paling relevan dalam menjelaskan dimensi ini. Terakhir, pengembangan infrastruktur untuk ekspansi ekonomi. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi kemudahan kerja sama ekonomi sekaligus pendalaman integrasi ekonomi. Harus diakui bahwa kesulitan terbesar dalam menggapai tingkat keuntungan perdagangan dan lemahnya investasi asing disebabkan oleh kondisi infrastruktur yang kurang memadai. Salah satu perhatian yang bisa dilihat ialah infrastruktur transportasi. Kondisi ini relevan dalam memengaruhi derajat integrasi ekonomi dalam suatu wilayah. Jika ketersediaan infrastruktur transportasi secara kuantitas dan kualitas tinggi, maka dapat memengaruhi tingkat perdagangan barang dan jasa suatu

kawasan. Di samping itu, negara yang mensponsori pembangunan infrastruktur fisik untuk tujuan konektivitas regional akan memiliki pengaruh strategis untuk menentukan arah kerja sama kedepannya.

Dari keempat bentuk KELN di atas menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi telah dikombinasikan dengan tujuan politik strategis. Sifat mengejar Impian China akan terus digelorakan oleh Xi Jinping untuk mengatasi tantangan domestik dan internasional, sekaligus meningkatkan status China sebagai bangsa besar. Keempat bentuk KELN China kemudian disatukan dalam sebuah inisiatif besar China yang bernama BRI. Atas itu, penulis menilai bahwa BRI sesungguhnya merupakan konvergensi dari sekian banyak jalur ekonomi luar negeri menjadi satu kesatuan. Praktik KELN China di bawah kendali Jinping dapat ditelusuri melalui BRI.

C. Internasionalisasi BUMN

Pada dasarnya, Siasat Mengglobal China ditujukan untuk memperoleh aset di luar negeri secara sistematis pada akhir tahun 1999. Kebijakan ini mendorong entitas bisnis untuk dapat berinvestasi dalam arena pasar luar negeri secara masif, seperti kemudahan peminjaman dari bank-bank domestik dan dukungan informasi (*information support*) dari pemerintah (Alon, Wang, Shen, & Zhang, 2014). Dengan kata lain, kebijakan ini sebagai upaya pemerintah China untuk menginternasionalisasi jaringan perusahaannya. Kebijakan ini kemudian memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi China semenjak tahun 2000-an. Ditandai dengan konsentrasi FDI keluar China yang hampir banyaknya terkonsentrasi di negara-negara berkembang. Selain itu, China telah menjadi negara eksportir terbesar dunia semenjak tahun 2014 (Liu & Dunford, 2016). Xi Jinping menganggap Siasat Mengglobal China harus ditingkatkan kembali hingga perusahaan-perusahaan itu mengisi segala rongga ekonomi kawasan dan internasional. Ambisi tersebut telah disampaikan di hadapan Sidang Komite Sentral PKC ke-18 pada bulan November 2013 (Hu, Tang, Yang, & Yan, 2017).

Perhatian Xi Jinping yang terkhusus pada BUMN dalam mewarnai persaingan kompetisi kerja sama BRI ditengari oleh keberhasilan kepemimpinan sebelumnya dalam menginisiasi penyalarsan dan reformasi BUMN pasca kebijakan reformasi dan pintu terbuka tahun 1978. Posisi BUMN sejak itu telah dipandang sebagai aktor sentris dalam melengkapi modernisasi ekonomi China. Pada akhir 1970-an, pemerintah pusat melegitimasi pembangunan perusahaan swasta. Jumlah perusahaan kian bertambah sejak saat itu. Diperkirakan telah berjumlah 1 juta pada tahun 1998 (Ahlstrom & Bruton, 2001). Di saat itu pula, serangkaian reformasi kebijakan BUMN terjadi bersamaan dengan lonjakan investasi swasta.

Terdapat empat fase reformasi BUMN yang pada gilirannya menikmati kompetisi globalisasi ekonomi. Fase pertama berlangsung tahun 1978-1984 yang bertujuan memodernisasi sistem manajemen kelembagaan. Para pihak pebisnis yang ditunjuk oleh PKC untuk membentuk perusahaan-perusahaan baru sekaligus membentik strategi kompetisi dalam merebut pasar. Secara spesifik, para pebisnis diperbolehkan mengelola bisnis swasta, dan BUMN memiliki fleksibilitas dan otonomi yang lebih luas dalam ranah kebijakan dan manajemen bisnis. BUMN tentu saja meraup keuntungan pasar yang kemudian diserahkan kepada negara. Keunikannya adalah BUMN dapat mempertahankan sebagian dari keuntungan mereka untuk keperluan ekspansi perusahaan. Pemerintah lantas mendorong sistem perpajakan baru, dan memperbolehkan penanaman modal asing. Tahap ini masih memperlihatkan pengelolaan BUMN secara sentralistis.

Reformasi fase kedua berlangsung tahun 1985-1993 yang ditandai oleh desentralisasi kekuasaan negara. Pemerintah provinsi di daerah memiliki peran penting untuk dapat terlibat dalam bisnis negara yang mengarah pada strategi pembangunan ekonomi daerah, khususnya menysar wilayah yang menghadapi ketimpangan pembangunan. Dengan demikian, pemerintah daerah diperkenankan untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sisi menarik lain dari fase ini ialah, pemerintah mulai terbuka bahkan mendukung pemisahan

kepemilikan dan pengelolaan BUMN. Reformasi fase ketiga berlangsung 1994-2002 di mana mendorong peningkatan privatisasi unit bisnis yang pada gilirannya terjadi lonjakan besar atas aksi jual/transfer kepemilikan BUMN di seluruh negeri. Kebijakan preferensial semacam ini sejatinya mengglobalisasikan BUMN, sementara sebagian besar BUMN yang bertaraf kecil itu diizinkan untuk mengubah kepemilikannya dari pemerintah menjadi entitas non-negara. Tujuannya agar sebagian besar BUMN dapat dijual kepada investor swasta.

Reformasi fase keempat berlangsung 2003 hingga saat ini yang terfokus pada tata kelola dan pengawasan. Fase ini dimulai dengan pembentukan SASAC yang bertujuan untuk memusatkan pengelolaan BUMN tingkat nasional dan daerah, dan mempromosikan merger dan akuisisi di antara BUMN besar. Peran SASAC di sini tergolong sentris karena menjembatani antara Dewan Negara dan BUMN. Akibatnya, lembaga ini mengambil kendali terkait pengangkatan jajaran kepemimpinan BUMN yaitu CEO, dewan direksi, dan manajer yang berasal dari lingkungan organisasi PKC (Pearson, 2005). Fungsi vital SASAC lainnya adalah mempromosikan sistem korporatisasi untuk perusahaan raksasa yang telah diciptakan dengan cara, yaitu penerapan teknik manajemen sektor swasta dan privatisasi parsial melalui penerbitan saham. Selanjutnya, SASAC mendapatkan kewenangan baru yang bersifat semi-independen untuk mengawasi sektor-sektor tertentu.

Progresivitas fase keempat menunjukkan penurunan jumlah BUMN besar. Semenjak tahun 2003 hingga 2016, jumlah BUMN pusat dari 196 menjadi 102 perusahaan. Di sisi lain, BUMN kian terkonsentrasi di sektor-sektor penting yang terkait untuk keamanan nasional dan penopang perekonomian nasional. BUMN dipertahankan oleh SASAC untuk menopang sektor pertahanan, jaringan listrik, migas, telekomunikasi, transportasi dan konstruksi, dst. Fakta keberhasilan kendali SASAC terhadap BUMN terlihat secara gamblang saat memanfaatkan momentum KFG 2008. He Liu (2015) menilai momen ini sebagai periode keuntungan strategis bagi China dalam

mengembangkan perekonomiannya karena memberi peluang strategis dalam rangka meningkatkan pasar domestik, ekspansi BUMN, dan peningkatan perolehan teknologi asing. Berdasarkan data yang dihimpun menunjukkan bahwa dalam 100 perusahaan multinasional China yang dipublikasikan oleh Konfederasi Perusahaan China, terdapat 84 perusahaan milik negara, di mana 50 BUMN nasional (sentral) ini memiliki aset fantastis yang berada di luar negeri sebesar RMB 4.5 triliun dan 34 adalah BUMD yang memiliki aset luar negeri sebesar RMB 500 milyar. Saat ini, pemerintah China telah memiliki aset luar negeri sebesar RMB 12 triliun. Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan China, pada tahun 2014 – perusahaan China telah menyalurkan investasi langsung sebesar US\$ 116 miliar, sehingga menjadikan China sebagai negara yang memiliki neraca perdagangan yang besar (Feng, 2016). Kehebatan ini turut menunjukkan eksistensi BUMN China sebagai aktor penting bagi investasi dan KELN China.

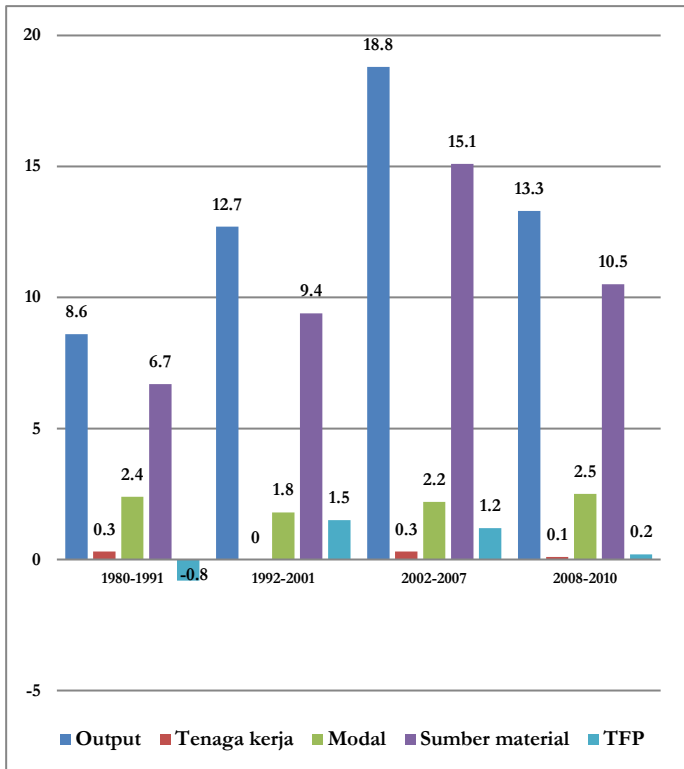
Pilar reformasi fase keempat terus digelorakan oleh Xi Jinping. Persis saat berpidato dalam Sidang Pleno Ketiga Kongres PKC ke-18 November 2013. Dua poin yang dicatat dalam pernyataan itu, yakni: (1) meluncurkan desain reformasi ekonomi yang dirancang untuk memainkan peran desisif dalam mengalokasikan sumber daya nasional; dan (2) menekankan keperluan pemerintah dalam mendorong, mendukung, dan membimbing entitas bisnis, baik milik negara maupun milik swasta. Pada saat yang sama, Komite Sentral PKC mengafirmasi kembali bahwa BUMN akan menjadi *leading role* dalam rencana pembangunan nasional di masa depan (China.org.cn, 2014).

Fokus ekspansi bisnis China tentu saja menjadi siasat untuk mempertahankan legitimasi rezim PKC. Tidak mengherankan juga, rezim ini terus memonopoli desain kebijakan nasional saat menghadapi tantangan ekonomi, sekaligus berusaha membawa China berdiri kokoh sebagai negara dengan pertumbuhan spektakuler. Semenjak, menghadapi badai KFG 2008 – Xi Jinping menggambarkan sebagai kondisi “normal baru (*new normal*)”. Istilah ini

mengarah pada kebijakan ekonomi domestik akan diarahkan untuk menjaga aktivitas ekonomi yang bergerak secara stabil (Peston, 2015). Caranya adalah menekankan pada pengurangan investasi berbasis kredit dan konsumsi domestik tingkat tinggi. Meskipun begitu, perlambatan ekonomi China sejatinya terjadi oleh kelebihan kapasitas produksi, khususnya di industri alat berat.

Rezim mempelajari bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dianggap berhasil apabila BUMN mengandalkan pada ekspor barang-barang manufaktur padat karya dan bahan baku. Hal itu sebagaimana diamati oleh ekonom Harry X. Wu (2014) dalam mendemonstrasikan pertumbuhan TFP China melambat secara konstan dari 1,5% dari tahun 1992-2001 menjadi 1,2% selama 2002-2007 dan selanjutnya menjadi 0,2% di tahun 2008-2010. Kelemahan produktivitas akibat industri lama yang terlalu mendominasi dalam arena pasar domestik pada gilirannya menciptakan kehilangan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) di sektor tenaga kerja. Untuk mengatasi hal tersebut, sebuah teori peningkatan kualitas tenaga kerja berpostulat bahwa kebijakan pemerintah yang menghadapi kelebihan kapasitas produksi sepatutnya merelokasi industri yang sebelumnya mempekerjakan tenaga kerja yang cukup tinggi bergerak keluar dengan mencari pasar baru di luar negeri (Yu, 2017).

Grafik 3. ESTIMASI TOTAL FAKTOR PRODUKTIVITAS INDUSTRI CHINA (DALAM PERSEN)



Sumber: (Wu, 2014).

Sejalan dengan itu, pemerintah pusat telah merespon isu ini semenjak tahun 2007 dengan menjadikannya sebagai prioritas pokok nasional. Akan tetapi – persoalan ini belum terselesaikan secara maksimal. Persoalan ini kerap kali dihindari oleh pemerintah pusat, sebab mengandung isu politik yang sensitif. Kegagalan dalam mengatasi kelebihan kapasitas produksi membutuhkan perbaikan secara menyeluruh terkait model kapitalisme negara yang selama ini dijalankan oleh China. Jika, pemerintah mengatasi kelebihan kapasitas produksi khususnya di sektor industri berat yang selama ini didominasi oleh BUMN, maka berpotensi mengganggu stabilitas kekuasaan di lingkaran PKC (Mitchell & Yang, 2016).

Industri ini juga telah mempekerjakan tenaga kerja yang cukup besar dari populasi China. Artinya, mengatasi persoalan ini sama saja dengan mengurangi tenaga kerja secara masif dan meningkatkan risiko distabilitas sosial dan kesenjangan baru. Persoalan ini berlanjut ketika KFG

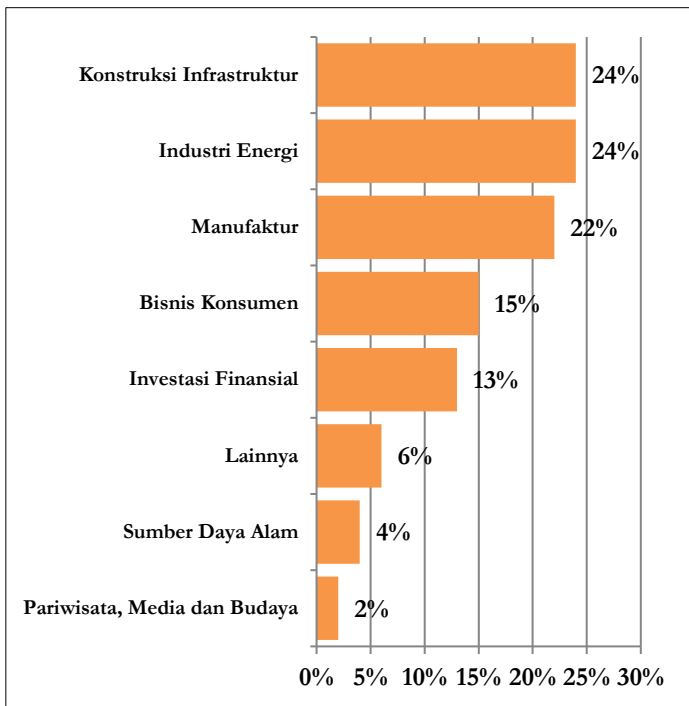
2008 menghampiri daratan China. Perlambatan ekonomi China mengharuskan pemerintah China untuk memangkas lebih dari 1,8 juta pekerja yang terserap di BUMN untuk industri barang berat (1,3 juta di sektor batu bara dan 500 ribu di sektor besi dan baja) pada tahun 2016 (Yao & Meng, 2016). Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah justru memprioritaskan pada penyesuaian pertumbuhan dan mempertahankan lapangan kerja tanpa menerapkan reformasi struktural. Pertanyaannya kemudian, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah China di tengah perlambatan ekonomi akibat kelebihan kapasitas produksi?

Jawabannya adalah eksistensi BRI sebagai program besar dari KELN China. Sebab, institusi ini dapat memitigasi persoalan ekonomi domestik tanpa harus menempuh kebijakan reformasi struktural. Artinya, kelebihan kapasitas dapat direlokasi ke pasar eksternal yang berada di sepanjang jalur BRI. Sebaliknya, pemerintah China justru memandang bahwa kehadiran BRI bukanlah sebagai kehendak untuk memfasilitasi persoalan ekonomi domestik. Mereka memandang bahwa secara esensial BRI bertujuan untuk meningkatkan kerja sama industrial kawasan dan internasional (Dollar, 2015). Terlepas dari penyangkalan tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran BRI memiliki rasionalitas ekonomi dari sisi domestik, yaitu: (1) merangsang pertumbuhan ekonomi China pasca KFG 2008; dan (2) menjadi mesin baru dalam menciptakan permintaan pasar yang lebih besar, khususnya bagi kelebihan kapasitas produksi domestik, seperti bahan baku (Yasheng, 1990; Rolland, 2017). Keduanya dapat dicapai jika dikombinasikan dengan mendorong perusahaan China untuk bergerak aktif ke pasar global. Dengan kata lain, kehadiran BRI sebagai instrumen terpenting bagi kelanjutan internasionalisasi perusahaan-perusahaan China.

Semenjak promosi kerja sama BRI dikumandangkan, sasaran investasi para BUMN melalui SASAC menysar berbagai skema investasi di berbagai kawasan. Terdapat 83 perusahaan China yang telah terdaftar secara resmi

terkait proyek BRI. Artinya, BRI memiliki arti besar bagi aktifitas perekonomian China – termasuk mendorong persaingan aktor bisnisnya, seperti konstruksi infrastruktur, energi, manufaktur, dll.

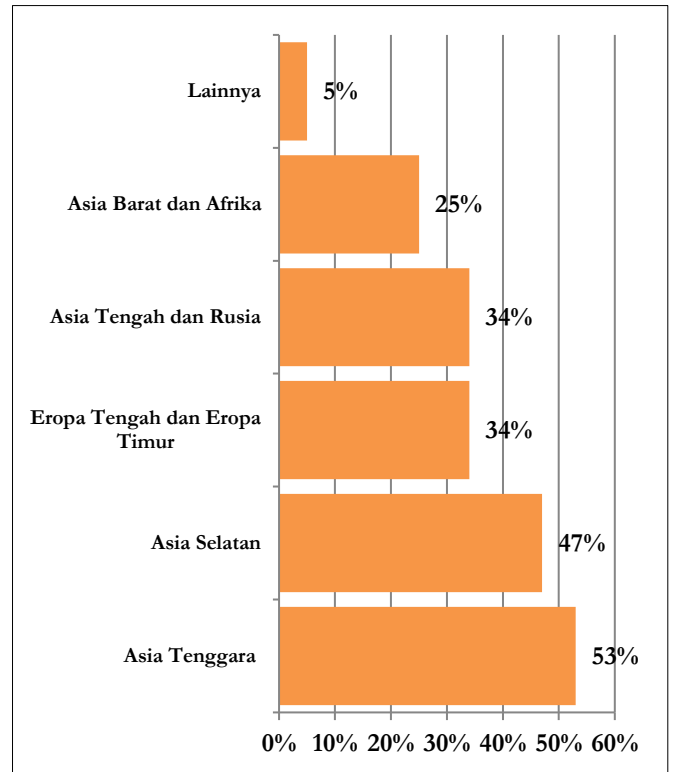
Grafik 4. KATEGORI DAN DISTRIBUSI BUMN CHINA DALAM BRI



Sumber: (Sze & Wu, 2016)

Sementara itu, kawasan Asia Tenggara yang masuk dalam jalur sutra maritim China, menunjukkan sebaran investasi terbesar dari China dan perusahaannya dibanding kawasan lain. Arus investasi ini lebih dijalankan oleh BUMN China dalam pembangunan infrastruktur transportasi, seperti terekam dalam grafik 2 di bawah ini. Sejauh ini, perhatian perusahaan ini berfokus pada pembangunan pelabuhan peti kemas (*container ports*), yang menjadi perangkat penting dalam jalur perdagangan logistik. BUMN China telah mengalokasikan investasi bagi pengembangan pelabuhan peti kemas ke Malaysia, Singapura, dan Myanmar dengan rasio kepemilikan saham perusahaan dengan rata-rata 47% (Yu, 2017).

Grafik 5. TUJUAN INVESTASI BUMN CHINA DALAM BRI



Sumber: (Sze & Wu, 2016)

IV. KESIMPULAN

Jika diintisarkan, keempat pemimpin China memiliki corak atau desain yang berbeda terkait agenda dalam merespon lingkungan internasional. Meskipun berbeda, namun pemimpin-pemimpin tersebut tetap menempatkan fondasi kebijakan luar negerinya ada pada pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, doktrin-doktrin yang bermunculan bersifat kompatibel mengenai pragmatisme ekonomi China dalam arena globalisasi ekonomi. Dengan demikian, tulisan membuktikan bahwaperilaku luar negeri China didasari oleh pertimbangan rasionalitas dalam merespon kondisi domestik dan lingkungan internasional.

Rasionalisasi KELN dapat diamati dari doktrin luar negeri dari masing-masing kepemimpinan. Meski, secara penamaan doktrin berbeda, penulis mengkonfirmasi bahwa memiliki kemas ide yang sama, yakni merekontekstualisasi peran global China dengan istilah Impian China. Itu terlihat dari orientasi reformasi dan pembangunan ekonomi yang dirumuskan oleh Xiaoping,

koeksistensi ekonomi damai menurut Zemin dan Zemin. Demikian halnya juga Jinping yang memposisikan hasrat kebangkitan China secara asertif dalam leksikal '*striving for achievement*'. Keberhasilan China tentu saja berasal dari keberhasilan praktik politik birokratis dalam merespon kebijakan isolasionis Mao pasca revolusi kebudayaan. Ketertinggalan ekonomi mendorong para lingkaran partai untuk merespon siasat mencapai keberhasilan China dengan berkompromi pada persaingan ekonomi dunia. Dengan demikian, hasrat penggapaian Impian China tentu saja tidak terlepas dari keberhasilan reformasi dan kebijakan pintu terbuka.

Apa yang menarik China kontemporer ialah kendali penuh Jinping dalam menerjemahkan secara cermat tentang Impian China. Figur kepemimpinannya mampu menciptakan koordinasi efektif antara pihak kader partai dan aktor bisnis. Sebagai balasan, Jinping lantas memberikan fasilitas kompetisi dalam meraup keuntungan ekonomi lebih besar melalui kehadiran BRI. Berdasar hal itu, BRI sesungguhnya dinilai sebagai instrumen terkemuka dalam melanjutkan kejayaan China. Jelasnya, BRI sebagai instrumen utama untuk mendorong internasionalisasi perusahaan-perusahaan China. Hal ini diiringi dengan dua parameter dasar. Pertama, kemunculan BRI menstimulus bertambahnya jaringan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang melibatkan China. Menurut Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional China menyatakan bahwa BRI dapat berkontribusi penting untuk memajukan kawasan industrial seperti kawasan kerja sama ekonomi dan perdagangan, kawasan kerja sama ekonomi lintas batas, dan mempromosikan pembangunan klaster industri di beberapa wilayah penting. Fenomena ini lantas memperkuat kerja sama pembangunan industrial antara China dengan negara-negara sekitar. Perusahaan-perusahaan China kemudian mendapatkan ruang baru untuk memperluas ekspansi bisnisnya. Kebijakan ini telah menampilkan keterlibatan pemerintah China bersifat proaktif dalam mempromosikan perusahaan-perusahaannya yang didahului kesepakatan kerja sama industrial bilateral

dengan negara yang dituju. Kedua, kehadiran BRI melalui kerja sama pembangunan infrastruktur fisik memiliki potensi besar untuk bagi entitas bisnis China. Jelasnya, kehadiran BRI di satu sisi mempercepat konektivitas suatu wilayah, di sisi lain menjadi arena penting bagi perusahaan-perusahaan China untuk memfokuskan investasinya dalam bidang transportasi di sepanjang jalur BRI. Hal ini diikuti dengan keunggulan komparatif China yaitu sektor industri alat berat atau bahan konstruksi yang sangat dibutuhkan dalam mengisi material proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

Di samping itu, tulisan ini juga hendak menyampaikan dua pandangan sederhana. Pertama, insiasi BRI yang dideklarasikan oleh Xi Jinping digaribawahi sebagai siasat guna mempertahankan pengaruh dihadapan rezim PKC. Sekalipun corak pemerintahan berbasis satu partai, rezim ini memelihara standar tinggi tentang bagaimana setiap pemimpin mampu merajut kemajuan China, sekaligus berpegang pada prinsip negara. Dengan demikian, pemerintahan otokratis di sini bersandar kepada pengelolaan negara penuh dengan rasionalisasi kebijakan yang mempertimbangkan Mimpi China. Figuritas kepemimpinan diukur dari penggapaian prestasi-prestasi baru bagi China dengan mengadopsi spirit revolusi komunisme dan reformasi ekonomi. Kedua, perhatian paling menonjol dari reputasi KELN China melalui peluncuran kebijakan reformasi ekonomi dan keterbukaan ekonomi luar negeri mendorong China menjadi pemain aktif dalam kompetisi komersial dunia. Hal itu lantas menempatkan peran aktor bisnis – BUMN – memiliki posisi strategis aliansi militer terbesar pasca Perang Dingin, kapabilitas militer NATO tentunya lebih besar dari Rusia yang baru mengalami kebangkitan kembali dibawah pemerintahan Vladimir Putin. Keunggulan NATO inilah yang kemudian menjadi dasar optimisme NATO untuk menaklukkan Kaliningrad melalui latihan militer bersama di Polandia dan negara-negara Baltik.

REFERENSI

- Ahlstrom, D., & Bruton, G. D. (2001). Learning from successful local private firms in China: Establishing legitimacy. *The Academy of Management Executive*, 15(1), 72-83.
- Allison, G. (2017). *Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?* London: Scribe Publications.
- Alon, I., Wang, H., Shen, J., & Zhang, W. (2014). Chinese State-Owned Enterprises Go Global. *Journal of Business Strategy*, 35(6), 3-18.
- Blanchard, J.-M. F. (2008). Harmonious World and China's Foreign Economic Policy: Features, Implications, and Challenges. *Journal of Chinese Political Science*, 13(2), 165-192.
- Callahan, W. (2005). Nationalism, Civilization and Transnational Relations: The Discourse of Greater China. *Journal of Contemporary China*, 14(43), 269-289.
- Cao, Q. (2007). Confucian Vision of a New World Order?: Culturalist Discourse, Foreign Policy and the Press in Contemporary China. *The International Communication Gazette*, 69(5), 431-450.
- Chaisse, J., & Matsushita, M. (2018). China's Belt and Road Initiative - Mapping the World's Normative and Strategic Implications. *Journal of World Trade*, 52(1), 163-186.
- Chen, X. (2018). Globalisation redux: can China's inside-out strategy catalyse economic development and integration across its Asian borderlands and beyond? *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 11(1), 35-58.
- china.org.cn. (2012). Xi Jinping Pledges 'Great Renewal of Chinese Nation'. Dipetik Mei 28, 2022, dari <https://www.mfa.gov.cn/ce/cefj//eng/gdxw/t993967.htm>
- China.org.cn. (2014). Decision of the Central Committee of the Communist Party of China on Some Major Issues Concerning Comprehensively Deepening the Reform. Dipetik May 28, 2022, dari http://www.china.org.cn/china/third_plenary_session/2014-01/16/content_31212602.htm
- chinadaily.com.cn. (2007). Full text of Hu Jintao's report at 17th Party Congress. Dipetik Mei 28, 2022, dari <https://www.mfa.gov.cn/ce/ceuk//eng/xnyfgk/t376863.htm>
- chinadaily.com.cn. (2013). President Vows to Press Ahead with Chinese Dream. Dipetik Mei 28, 2022, dari <https://www.mfa.gov.cn/ce/cefj//eng/gdxw/t1022179.htm>
- troops-nato-welcome/index.html?r=https%3A%2F%2Fwww.google.co.id%2F
- China's MOFA. (2014). The Central Conference on Work Relating to Foreign Affairs was Held in Beijing. Dipetik Mei 28, 2022, dari https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb_663304/zjg_663340/xws_665282/xgxw_665284/201412/t20141201_600270.html
- Das, K. C. (2017). The Making of One Belt, One Road and Dilemmas in South Asia. *China Report*, 53(2), 125-142.
- Dollar, D. (2015). China's Rise as a Regional and Global Power: The AIIB and the One Belt, One Road. *Horizons*(4), 162-172.
- en.people.cn. (2002). 16th CPC Party Congress Opens in Beijing. Dipetik Mei 28, 2022, dari http://en.people.cn/200211/08/eng20021108_106479.shtml
- Feng, E. (2016, October 13). Xi Jinping Reminds China's State Companies of Who's the Boss. Dipetik Mei 28, 2022, dari <https://www.nytimes.com/2016/10/14/world/asia/china-soe-state-owned-enterprises.html>
- Ferdinand, P. (2016). Westward ho-the China Dream and 'One Belt, One Road': Chinese Foreign Policy Under Xi Jinping. *International Affairs*, 92(4), 941-957.
- Fung, K. C., Aminian, N., (Maggie), X., Fu, & Kornhohen, i. (2018). Internationalization of the use of Chinese currency: perspectives from the New and the Ancient Silk Roads. *Journal of Chinese Economic and Business Studies*, 16(1), 1-16.
- Garlick, J. (2017). If You Can't Beat'em, Join'em: Shaping India's Response to China's 'Belt and Road' Gambit. *China Report*, 53(2), 143-157.
- Garnaut, J. (2013). Xi's War Drums. *Foreign Policy*(May/June). Diambil kembali dari <https://goo.gl/74u2hG>
- Górski, J. (2016). Central and Eastern Europe, Group 16+1 and One Belt One Road: the Case of 2016 Sino-Polish Comprehensive Strategic Partnership. *Transnational Dispute Management*, 14(3), 1-37.
- He, K. (2017). Explaining United States-China Relations: Neoclassical Realism and the Nexus of Threat-Interest Perceptions. *Pacific Review*, 30(2), 133-51.
- Heath, T. R. (2012). What Does China Want? Discerning the PRC's National Strategy. *Asian Security*, 8(1), 54-72.

- Holslag, J. (2017). How China's New Silk Road Threatens European Trade. *The International Spectator*, 52(1), 46-60.
- Hu, A., Tang, X., Yang, Z., & Yan, Y. (2017). *The Modernization of China's State Governance*. Singapore: Springer.
- Jacob, J. T. (2017). China's Belt and Road Initiative: Perspectives from India. *China & World Economy*, 25(5), 78-100.
- Jakobson, L., & Knox, D. (2010). New Foreign Policy Actors in China. *SIPRI Policy Paper*(26), 1-51.
- Jerden, B. (2014). The Assertive China Narrative: Why It Is Wrong and How So Many Still Bought into It. *The Chinese Journal of International Politics*, 7(1), 47-88.
- Jisi, W. (2011). China's Search for a Grand Strategy: A Rising Great Power Finds Its Way. *Foreign Affairs*, 90(2), 68-79.
- Johnston, A. I. (2013). How New and Assertive Is China's New Assertiveness? *International Security*, 37(4), 7-48.
- Kavalski, E. (2009). 'Do as I Do': The Global Politics of China's Regionalization. Dalam E. Kavalski (Penyunt.), *China and the Global Politics of Regionalization* (hal. 1-16). Surrey: Ashgate.
- Lam, W. (2009). Hu Jintao Unveils Major Foreign Policy Initiative. *China Brief*, 9(24), 2-4.
- Lam, W. (2015). One Belt, One Road" Enhances Xi Jinping's Control Over the Economy. *China Brief: A Journal of Analysis and Information*, 14(10), 3-6.
- Layne, C. (1993). The Unipolar Illusion: Why New Great Powers Will Rise. *International Security*, 17(4), 5-51.
- Lin, J. Y. (2004). Is China's Growth Real and Sustainable. *Asian Perspective*, 28(3), 5-29.
- Liu, H. (2015). A Comparative Study of Two Global Crises. *Frontiers of Economics in China*, 10(3), 396-413.
- Liu, W., & Dunford, M. (2016). Inclusive Globalization: Unpacking China's Belt and Road Initiative. *Area Development and Policy*, 1(3), 323-340.
- Mackerras, C. (2015). Xinjiang in China's Foreign Relations: Part of a New Silk Road or Central Asian Zone of Conflict? *East Asia*, 32(1), 25-42 and Winston.
- Masuda, M. (2016). Why Has Chinese Foreign Policy Become More Assertive? Dipetik Mei 28, 2022, dari <https://www.eastasiaforum.org/2016/02/20/why-has-chinese-foreign-policy-become-more-assertive/>
- Mearsheimer, J. J. (2014, Oktober 25). Can China Rise Peacefully? Dipetik Mei 28, 2022, dari <https://nationalinterest.org/commentary/can-china-rise-peacefully-10204>
- Medeiros, E. S. (2009). *China's International Behavior: Activism, Opportunism, and Diversification*. Santa Monica: RAND Corporation.
- Men, J. (2008). EU-China Relations: Problems and Promises. *Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series*, 8(13), 1-9.
- Mitchell, T., & Yang, Y. (2016). China Rails Against Global 'Hype' on Overcapacity. Dipetik May 28, 2022, dari <https://www.ft.com/content/9ee9f1ca-2bca-11e6-a18d-a96ab29e3c95>
- Naughton, B. (2007). *The Chinese Economy: Transitions and Growth*. London: MIT Press.
- Nordin, A. H., & Weissmann, M. (2018). Will Trump Make China Great Again? The Belt and Road Initiative and International Order. *International Affairs*, 94(2), 231-249.
- Pearson, M. M. (2005). The Business of Governing Business in China: Institutions and Norms of the Emerging Regulatory State. *World Politics*, 57(2), 296-322.
- Peston, R. (2015). What is China's 'New Normal'? Dipetik Mei 28, 2022, dari *Institute of International Affairs 1944-*, 91(5), 1103-1121. Retrieved January 17, 2021, from <http://www.jstor.org.ezproxy.ugm.ac.id/stable/2453902> http://en.qsttheory.cn/2021-07/12/c_641469.htm 1.
- Poh, A., & Li, M. (2017). A China in Transition: The Rhetoric and Substance of Chinese Foreign Policy under Xi Jinping. *Asian Security*, 13(2), 84-97.
- Poh, A., & Li, M. (2017). A China in Transition: The Rhetoric and Substance of Chinese Foreign Policy under Xi Jinping. *Asian Security*, 13(2), 84-97.
- Rolland, N. (2017). China's "Belt and Road Initiative": Underwhelming or Game-Changer? *The Washington Quarterly*, 40(1), 127-142.
- Russo, A. (2013). How Did the Cultural Revolution End? The Last Dispute between Mao Zedong and Deng Xiaoping, 1975. *Modern China*, 39(3), 239-279.
- Scobell, A. (2021). Constructing a U.S.-China Rivalry in the Indo-Pacific and Beyond. *Journal of Contemporary China*, 30(127), 69-84.

- Sung, Y.-W. (1991). *The China-Hong Kong Connection: The Key to China's Open Door Policy: The Key to China's Open Door Policy*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Sze, N., & Wu, F. (2016). "One Belt, One Road" The Internationalization of China's SOEs. *Deloitte Perspective*, 5, 5-21.
- Tracy, E. F., Shvarts, E., Simonov, E., & Babenko, M. (2017). China's New Eurasian Ambitions: The Environmental Risks of the Silk Road Economic Belt. *Eurasian Geography and Economics*, 58(1), 56-88.
- Vogel, E. F. (2011). *Deng Xiaoping and the Transformation of China*. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Williams, J., Robinson, C., & Bouzarovski, S. (2019). China's Belt and Road Initiative and the emerging geographies of global urbanisation . *The Geographical Journal*, 186(1), 128-140.
- Wu, H. X. (2014). Rethinking China's Industrialization: Economics Explanation of Roles of State and Government. *Bijiao*, 75(1), 1-23.
- Xuetong, Y. (2014). From Keeping a Low Profile to Striving for Achievement. *The Chinese Journal of International Politics*, 7(2), 153-184.
- Yahuda, M. (1993). Deng Xiaoping: The Statesman. *The China Quarterly*, 135, 551-572.
- Yao, K., & Meng, M. (2016). China Expects to Lay Off 1.8 million Workers in Coal, Steel Sectors. Dipetik May 28, 2022, dari <https://www.reuters.com/article/us-china-economy-employment-idUSKCN0W205X>
- Yasheng, H. (1990). Web of Interests and Patterns of Behaviour of Chinese Local Economic Bureaucracies and Enterprises during Reforms. *The China Quarterly*, 123, 431-458.
- Yongnian, Z., & Chi, Z. (2018). The Belt and Road Initiative and China's Grand Diplomacy. *China and the World*, 1(3).
- Yu, H. (2017). China's Belt and Road Initiative and Its Implications for Southeast Asia. *Asia Policy*, 24, 117-122.
- Yu, H. (2017). Motivation behind China's 'One Belt, One Road' Initiatives and Establishment of the Asian Infrastructure Investment Bank. *Journal of Contemporary China*, 26(105), 353-368
- Zhang, D. (2017). The Concept of 'Community of Common Destiny' in China's Diplomacy: Meaning, Motives and Implications. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 5(2), 196-207.